

MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH DI SMPN 1 MATARAM

M. Naufal Fazli Riaz ^{*1}

Nita Kartika ²

^{1,2} Program Studi PPKn, Fakultas FKIP, Universitas Mataram

*e-mail : naufalfazliriaz@gmail.com , Nitaakartikaa@gmail.com

Abstrak

Manajemen keuangan sekolah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip, mekanisme pengelolaan, serta tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengelola sumber dana pendidikan. Metode penelitian menggunakan wawancara dengan pihak sekolah serta studi literatur terhadap regulasi dan referensi terkait pengelolaan keuangan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi mendukung ketertiban administrasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen keuangan sekolah yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik merupakan kunci peningkatan mutu pendidikan.

Kata kunci: manajemen keuangan sekolah, wawancara, studi literatur, transparansi, akuntabilitas, pengawasan keuangan, dana pendidikan.

Abstract

School financial management is a process of planning, organizing, implementing, and supervising all financial activities to support the achievement of educational goals effectively and efficiently. This study aims to describe the principles, management mechanisms, and challenges faced by schools in managing educational funding sources. The research employed interviews with school personnel and literature studies based on relevant regulations and references on educational financial management. The findings indicate that transparency, accountability, and stakeholder participation are key factors in creating effective financial management. In addition, the use of information technology supports administrative order and enhances the effectiveness of financial supervision. This study concludes that professional school financial management that is oriented toward students' needs is essential for improving the quality of education.

Keywords: school financial management, interviews, literature study, transparency, accountability, financial supervision, educational funding.

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan sekolah sangat penting dalam pemenuhan proses belajar mengajar agar bisa berjalan terencana, efektif, dan berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, sekolah wajib mampu mengelola uang secara profesional agar setiap kegiatan pendidikan didukung oleh dana yang cukup. Pengelolaan keuangan tidak hanya sekadar mencatat pengeluaran, tetapi mencakup perencanaan dana, pengalokasian uang, pelaksanaan program yang didanai, hingga pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan dana. Dengan demikian, manajemen keuangan membentuk dasar kuat dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekolah saat ini memperoleh dana dari berbagai sumber, mulai dari dana pemerintah seperti BOS dan hibah, partisipasi masyarakat lewat komite sekolah, hingga dana mandiri yang dikembangkan sendiri oleh sekolah. Keragaman sumber dana ini membutuhkan sistem manajemen keuangan yang terstruktur dan transparan agar dana bisa digunakan secara tepat sasaran. Namun dalam praktiknya, menggabungkan berbagai sumber dana sering kali menemui kendala, seperti ketidaksesuaian laporan, saling tumpang tindih anggaran, atau penggunaan dana yang tidak efisien. Hal ini mendorong sekolah untuk memiliki mekanisme pengelolaan yang lebih matang dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, tantangan lain dalam manajemen keuangan sekolah adalah keterbatasan kemampuan staf administrasi, kurangnya pemahaman terhadap aturan keuangan, serta minimnya penggunaan teknologi sebagai alat bantu pengelolaan dana. Banyak sekolah masih menggunakan metode manual dalam mengelola keuangan, sehingga rentan terjadi kesalahan dan

proses pelaporan yang lambat. Keterbatasan pengawasan internal juga bisa menyebabkan terjadinya penggunaan dana yang tidak semestinya, yang berdampak pada rendahnya tingkat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sekolah. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan penelitian yang mampu menampilkan kondisi keuangan sekolah secara nyata dan memberikan strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan pihak sekolah serta studi literatur, sehingga menggabungkan pengalaman langsung dari lapangan dengan teori yang relevan. Wawancara memberikan data nyata tentang praktik keuangan yang berlangsung, sedangkan studi literatur memperkuat pemahaman tentang standar dan regulasi pengelolaan keuangan pendidikan.

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan sekolah, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian juga diharapkan bisa memberikan rekomendasi bagi sekolah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dengan manajemen keuangan yang baik, sekolah tidak hanya mampu menjelaskan penggunaan dana secara jelas, tetapi juga bisa mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Menurut Mulyasa (2007), pengelolaan keuangan sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan efisien. Dalam konteks sekolah, pengelolaan keuangan mencakup pengumpulan dana, penyaluran anggaran, serta pertanggungjawaban penggunaannya. Hal ini sesuai dengan praktik di SMPN 1 Mataram, di mana dana dikelola berdasarkan rencana dalam ARKAS dan didukung oleh berbagai pihak di dalam sekolah.

2. Sumber Dana Pendidikan dan Dana BOS

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, Dana BOS adalah bantuan dari pemerintah yang digunakan untuk kegiatan operasional non-personalia yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Dana BOS harus digunakan sesuai rencana anggaran yang dibuat sekolah dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan non-pendidikan. Selain Dana BOS, sekolah juga bisa mendapatkan dana dari sumber lain seperti koperasi, kantin, masyarakat, atau komite sekolah selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan SMPN 1 Mataram yang menggunakan Dana BOS sebagai sumber utama, ditambah dana dari koperasi dan kantin untuk kebutuhan mendesak.

3. Pengawasan Anggaran Pendidikan

Menurut Supriyadi (2010), pengawasan dalam pengelolaan pendidikan bertujuan memastikan aktivitas sekolah berjalan sesuai rencana, aturan, dan tujuan. Pengawasan keuangan dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari penyimpangan penggunaan dana. Pengawasan biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, bendahara, dan pihak terkait seperti komite sekolah. Hal ini sesuai dengan mekanisme di SMPN 1 Mataram yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, KTU, wakil kepala sekolah, dan ketua komite dalam menjaga pelaksanaan anggaran.

4. Tantangan dalam Pengelolaan Dana Pendidikan

Menurut Mahmudi (2015), salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik seperti sekolah adalah keterbatasan fleksibilitas anggaran dan aturan yang ketat dalam penggunaannya. Keterbatasan dalam belanja modal, prosedur pergeseran anggaran, serta larangan penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak relevan menjadi hambatan yang sering terjadi. Selain itu, anggaran sekolah harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga perubahan mendadak sulit dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi di SMPN 1 Mataram yang menghadapi kendala ketika pergeseran anggaran sudah mencapai batas, serta aturan yang ketat dalam penggunaan Dana BOS.

METODE

1. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak sekolah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, bendahara, dan staf administrasi dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, kendala, serta cara pengelolaan keuangan secara rinci sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

2. Metode Studi Literatur

Metode studi literatur dilakukan dengan membaca berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, aturan pemerintah, dan laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan sekolah. Tujuan dari studi literatur adalah untuk memperkuat teori yang digunakan, memahami aturan penggunaan dana pendidikan, serta membandingkan praktik di lapangan dengan teori yang telah dijelaskan oleh para ahli.

3. Metode Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pengelolaan keuangan berlangsung di sekolah. Hal-hal yang diamati mencakup cara mencatat keuangan, penyimpanan berkas anggaran, jalur pengesahan penggunaan dana, hingga sistem pengawasan internal. Observasi ini memperkuat hasil wawancara melalui bukti-bukti nyata yang ditemukan di lapangan.

4. Metode Triangulasi Data

Metode triangulasi data digunakan untuk memastikan kebenaran dan kesahihan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi literatur agar data lebih kuat, dapat dipercaya, dan memiliki dasar yang jelas. Teknik ini membantu mengurangi kesalahan serta menemukan konsistensi dalam informasi terkait manajemen keuangan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:



1. Sumber Dana Sekolah dan Pola Penggunaannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPN 1 Mataram memiliki beberapa sumber dana, namun yang paling utama adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini menjadi fondasi utama untuk membiayai berbagai kebutuhan sekolah, terutama belanja pembelajaran dan perawatan sarana pendidikan. Penggunaan Dana BOS di sekolah ini selalu mengikuti perencanaan yang tertuang dalam ARKAS, yaitu aplikasi digital untuk menata kegiatan dan anggaran sekolah. Dengan sistem ini, seluruh kegiatan penggunaan dana harus sesuai dengan rencana, sehingga tidak ada kebijakan secara mendadak atau pengeluaran yang tidak tercatat dalam anggaran, meski pun situasinya mendesak. Selain Dana BOS, sekolah juga mendapat dana dari koperasi sekolah yang dikelola sendiri. Dana koperasi biasanya berasal dari hasil penjualan alat tulis, seragam, atau usaha kecil lainnya. Dana ini lebih fleksibel dibanding Dana BOS karena tidak terikat pada aturan yang sangat ketat. Karena itu, dana koperasi bisa digunakan untuk kebutuhan darurat seperti perbaikan gedung, belanja makanan saat menerima tamu, atau kebutuhan administrasi

kecil. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi sekolah berfungsi sebagai sumber dana cadangan yang bisa digunakan ketika ada keadaan darurat.

Sebelumnya, sekolah juga mendapat pendapatan dari usaha kantin, tetapi sejak Pemerintah Kota Mataram mengambil alih pengelolaan kantin, sekolah tidak lagi menerima pendapatan dari sumber ini. Hilangnya pendapatan kantin membuat sekolah semakin bergantung pada Dana BOS dan dana koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi sumber dana sangat penting untuk menjaga ketersediaan dana dan stabilitas keuangan. Jika salah satu sumber dana hilang, maka fleksibilitas operasional juga akan berkurang. Lebih lanjut, penelitian juga mengungkapkan bahwa meskipun ada beberapa sumber dana, bagian terbesar dan yang paling bernilai tetap berasal dari Dana BOS. Hal ini menyebabkan sekolah tetap bergantung pada dana dari pemerintah. Ketergantungan ini bisa berisiko jika sekolah membutuhkan kegiatan atau fasilitas tambahan yang tidak tercakup dalam aturan BOS. Oleh karena itu, struktur pendanaan sekolah masih belum sepenuhnya mandiri, dan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

2. Mekanisme Pengawasan Anggaran yang Bersifat Kolektif, Terstruktur, dan Berjenjang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan anggaran di SMPN 1 Mataram dilakukan secara kolektif dan melibatkan berbagai pihak dalam struktur organisasi sekolah. Pengawasan utama dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara, yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Kepala sekolah memastikan rencana kerja tahunan sesuai dengan arah kebijakan sekolah, sedangkan bendahara mengatur pencatatan, penyaluran dana, dan penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, Kepala Tata Usaha (KTU) memiliki peran administratif penting terutama dalam mengelola dan memverifikasi data keuangan. KTU memastikan setiap transaksi memiliki bukti fisik atau dokumen yang sah, sehingga mengurangi risiko kesalahan administratif. Keterlibatan wakil kepala sekolah, seperti wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil humas, memberikan dimensi pengawasan yang lebih luas. Mereka memantau penggunaan dana sesuai kebutuhan program kerja di bidang masing-masing. Contohnya, wakil kurikulum mengawasi penggunaan dana untuk pembelajaran, sementara wakil kesiswaan memastikan kegiatan siswa berjalan sesuai anggaran. Ketua komite sekolah juga turut serta dalam pengawasan, berperan sebagai wakil masyarakat dan orang tua. Komite sekolah memberikan pertimbangan, dukungan moral, serta pengawasan eksternal agar penggunaan dana tetap transparan dan akuntabel. Keterlibatan komite menunjukkan upaya kolaboratif dalam menjaga integritas penggunaan anggaran.

Dengan adanya pengawasan yang bertingkat, sistem keuangan di SMPN 1 Mataram cenderung aman dan terkontrol. Namun, penelitian menemukan bahwa mekanisme kolektif ini bisa membuat proses persetujuan lebih lama, terutama ketika harus melibatkan banyak pihak. Meskipun demikian, sistem ini sangat efektif dalam mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas publik.

3. Prioritas Penggunaan Dana BOS pada Sarana Prasarana Pembelajaran dan Pembayaran Honor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana BOS di SMPN 1 Mataram digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan sarana belajar seperti meja, kursi, dan alat pendukung lainnya. Penyediaan sarana ini dilakukan karena jumlah siswa yang banyak membutuhkan fasilitas yang memadai. Prioritas ini menunjukkan bahwa sekolah lebih mementingkan kualitas proses belajar mengajar dalam penggunaan dana BOS.

Selain itu, dana BOS juga digunakan untuk membayar honorarium bagi guru tetap (GTT) dan pegawai tetap (PTT). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik non-PNS mempunyai peran penting dalam menjalankan operasional sekolah. Sistem pembayaran honor yang harus dilakukan sebelum tanggal 20 setiap bulannya menunjukkan bahwa dana BOS sangat penting dalam menjaga penghasilan tenaga non-PNS, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan pendidikan. Dana BOS juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai, selama tetap mematuhi aturan yang berlaku. Pemanfaatan dana untuk kesejahteraan menunjukkan upaya sekolah dalam memberikan dukungan agar para tenaga kerja tetap termotivasi dan berkomitmen.

Namun, penelitian menemukan bahwa fokus penggunaan dana pada kebutuhan sehari-hari membuat sekolah sulit menyediakan dana tambahan untuk pengembangan fasilitas jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh aturan BOS yang membatasi setiap pengeluaran harus sesuai dengan pos anggaran yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, prioritas penggunaan dana di SMPN 1 Mataram bersifat praktis dan bertujuan memastikan berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi kurang memberikan ruang untuk inovasi atau pengembangan fasilitas secara luas.

4. Tantangan Pengelolaan Keuangan: Regulasi Ketat, Keterbatasan Belanja Modal, dan Minimnya Fleksibilitas

Penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam mengelola anggaran di SMPN 1 Mataram adalah terbatasnya kemampuan sekolah dalam membeli barang modal. Hal ini disebabkan oleh sistem pergeseran anggaran yang hanya bisa dilakukan maksimal 12 kali dalam setahun. Saat sekolah sudah mencapai batas tersebut, mereka tidak bisa mengubah alokasi anggaran meskipun ada kebutuhan mendesak, seperti memperbaiki fasilitas yang rusak atau mengganti peralatan penting. Regulasi yang ketat terkait penggunaan Dana BOS juga menjadi tantangan besar. Aturan yang melarang dana tersebut digunakan untuk hal-hal non-pendidikan seperti rekreasi, konsumsi, atau pembayaran honor membuat sekolah harus sangat hati-hati saat merencanakan anggaran. Kegiatan sosial atau upacara tidak bisa dibiayai menggunakan Dana BOS, sehingga sekolah sering kali harus mencari sumber dana lain.

Selain itu, ARKAS sebagai sistem digital penganggaran memiliki keuntungan dalam meningkatkan transparansi, namun juga memiliki keterbatasan. Ketika kebutuhan sekolah tiba-tiba berubah, sistem ini tidak memungkinkan perubahan cepat, kecuali melalui proses pergeseran yang memakan waktu panjang dan jumlahnya terbatas. Hal ini menyebabkan sekolah sering mengundurkan kebutuhan tertentu hingga tahun anggaran berikutnya. Kurangnya fleksibilitas pendanaan membuat sekolah sangat bergantung pada dana koperasi sebagai sumber dana darurat. Namun, jumlah dana koperasi terbatas, sehingga tidak bisa menutupi kebutuhan besar. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa sekolah perlu memperluas sumber pendanaan agar operasional lebih stabil dan bisa merespons keadaan darurat dengan lebih baik.

ISI DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai manajemen keuangan di SMPN 1 Mataram menunjukkan bahwa pengelolaan dana sekolah berjalan dalam struktur pendanaan multi-sumber yang mencakup Dana BOS, dana koperasi sekolah, serta dana non-reguler lain yang jumlahnya relatif kecil. Meskipun demikian, sekolah masih sangat bergantung pada Dana BOS sebagai sumber pendanaan utama yang menggerakkan sebagian besar kegiatan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Dana BOS sebagai tulang punggung pembiayaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan masih sangat dominan, sejalan dengan teori Levin (1987) mengenai *school finance* yang menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan penggunaan dana untuk mencapai tujuan pendidikan.

Rencana Kegiatan dan Anggaran bersama tim BOS dan guru/staf, dengan prioritas alokasi dana yang mendukung kelancaran proses belajar-mengajar. Dana BOS di SMPN 1 Mataram tidak hanya mendukung pembiayaan kegiatan pembelajaran, tetapi juga menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar dan pembayaran honor bagi guru dan pegawai tidak tetap. Penggunaan dana ini sepenuhnya mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang tersusun dalam ARKAS, sehingga memungkinkan adanya transparansi dan pengawasan digital, meskipun sistem ini juga menyebabkan keterbatasan fleksibilitas ketika sekolah menghadapi kebutuhan mendadak yang tidak tercantum dalam rencana awal.



Di sisi lain, keberadaan koperasi sekolah menjadi sumber pendanaan alternatif yang memiliki tingkat fleksibilitas lebih besar dibandingkan Dana BOS. Dana koperasi biasanya berasal dari penjualan alat tulis, perlengkapan sekolah, serta usaha kecil lainnya, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti konsumsi untuk tamu, perbaikan fasilitas ringan, dan kebutuhan administratif mendadak. Keberadaan dana koperasi ini penting karena dapat mengisi ruang kebutuhan yang tidak dapat dibiayai oleh BOS akibat aturan penggunaannya yang ketat. Namun, hilangnya pendapatan dari kantin sekolah setelah diambil alih oleh Pemerintah Kota Mataram membuat sekolah kehilangan salah satu sumber pendapatan mandiri, sehingga tingkat ketergantungan pada BOS dan koperasi semakin meningkat. Situasi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian finansial sekolah masih rendah dan rentan jika terjadi perubahan kebijakan atau kebutuhan di luar perencanaan.

Dalam hal pengawasan anggaran, SMPN 1 Mataram menerapkan mekanisme pengawasan yang bersifat kolektif, berlapis, dan terstruktur. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama dalam setiap kebijakan keuangan, sedangkan bendahara bertugas melakukan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan transaksi keuangan sehari-hari. Selain itu, Kepala Tata Usaha (KTU) berperan dalam memastikan administrasi keuangan berjalan tertib, terutama dalam pengelolaan dokumen fisik seperti kwitansi, faktur, dan bukti transaksi lainnya. Keterlibatan wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum, kesiswaan, dan humas memperkuat mekanisme pengawasan internal karena setiap wakil kepala sekolah mengawasi penggunaan dana sesuai program kerja di bidang masing-masing. Kehadiran komite sekolah sebagai bagian dari pengawasan eksternal menjadi aspek penting dalam menjaga akuntabilitas publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Model pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Permendikbud tentang pengelolaan Dana BOS dan teori Supriyadi (2010) mengenai pentingnya pengawasan dalam menghindari penyimpangan. Namun demikian, laporan penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme kolektif tersebut cenderung memperpanjang proses persetujuan anggaran, terutama ketika diperlukan pengeluaran tertentu yang harus mendapatkan tanda tangan beberapa pihak sekaligus.

Terkait prioritas penggunaan Dana BOS, penelitian menemukan bahwa anggaran sekolah difokuskan pada pemenuhan sarana pembelajaran seperti meja, kursi, dan fasilitas kelas lainnya. Pemilihan prioritas ini didasarkan pada kebutuhan nyata untuk menunjang kenyamanan dan efektivitas pembelajaran siswa. Selain sarana, dana BOS digunakan untuk membayar honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), sehingga keberlangsungan operasional harian sekolah sangat bergantung pada ketersediaan dana BOS. Pembayaran honor ini dilakukan tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulan, menunjukkan bahwa kondisi finansial bagi guru non-PNS semakin ditopang oleh dana BOS. Temuan ini memperkuat teori Mulyasa (2007) mengenai efektivitas pengelolaan keuangan yang berorientasi pada pencapaian tujuan layanan pendidikan, yaitu proses belajar mengajar yang berjalan lancar. Namun, fokus penggunaan dana pada kebutuhan rutin membuat sekolah sulit melakukan investasi jangka panjang seperti pembangunan fasilitas baru atau pembelian peralatan modal besar.

Tantangan pengelolaan keuangan di SMPN 1 Mataram terutama terkait dengan ketatnya regulasi dana BOS dan keterbatasan dalam pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran hanya

dapat dilakukan sebanyak dua belas kali dalam satu tahun anggaran, sehingga ketika batas tersebut terpenuhi, sekolah tidak dapat lagi menyesuaikan anggaran meskipun ada kebutuhan mendesak seperti kerusakan sarana vital atau perubahan kegiatan pembelajaran yang tak terduga. ARKAS sebagai sistem digital memiliki kelebihan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, namun juga menimbulkan hambatan karena tidak memungkinkan perubahan cepat tanpa melalui prosedur formal yang panjang. Aturan penggunaan Dana BOS yang melarang pembiayaan konsumsi, fee narasumber, rekreasi, maupun kegiatan non-pendidikan mempersempit ruang gerak sekolah, sehingga sekolah harus mengandalkan dana koperasi untuk kebutuhan kecil yang tidak bisa dibiayai BOS. Keterbatasan dana koperasi menyebabkan sekolah tidak memiliki dana cadangan yang cukup untuk kebutuhan menengah hingga besar, memperkuat kesimpulan bahwa fleksibilitas keuangan sekolah masih rendah. Situasi ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa organisasi publik sering terhambat oleh rigiditas anggaran dan keterbatasan dalam perubahan alokasi dana.

Dalam penyusunan anggaran, proses dilakukan melalui tahapan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengumpulan usulan kebutuhan oleh guru, wakil kepala sekolah, dan KTU, penyelarasan dengan rencana kerja sekolah, hingga penyusunan anggaran di ARKAS yang kemudian divalidasi oleh kepala sekolah dan tim BOS daerah. Setelah disahkan, sekolah wajib melaksanakan semua program sesuai alokasi anggaran tanpa boleh melakukan pergeseran yang tidak sesuai prosedur. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala dengan menggunakan buku kas umum, buku besar, laporan realisasi anggaran, serta dokumen bukti fisik transaksi. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaporan anggaran sesuai Depdiknas (2007) dan Permendikbud BOS 2021.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPN 1 Mataram telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Penggunaan ARKAS mendukung tertib administrasi, sementara pengawasan yang berlapis memperkuat keamanan dana sekolah. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada Dana BOS, minimnya diversifikasi sumber pendanaan, dan keterbatasan fleksibilitas anggaran masih perlu ditangani agar sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara lebih inovatif dan berkelanjutan. Dengan memperluas sumber pendanaan, meningkatkan kapasitas SDM administrasi keuangan, serta memperkuat manajemen kemandirian finansial, SMPN 1 Mataram dapat mencapai pengelolaan keuangan yang lebih stabil dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan di SMPN 1 Mataram telah berjalan dengan cukup baik dan mengikuti prinsip dasar pengelolaan keuangan pendidikan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Sekolah memiliki beberapa sumber pendanaan, namun dari keseluruhan informasi yang kami peroleh, Dana BOS tetap menjadi sumber utama yang menopang sebagian besar kegiatan operasional. Ketergantungan ini membuat perencanaan anggaran sangat terikat pada aturan BOS dan sistem ARKAS, sehingga penggunaan dana harus benar-benar sesuai dengan rencana awal. Koperasi sekolah berfungsi sebagai sumber dana alternatif yang lebih fleksibel, tetapi jumlahnya terbatas dan belum mampu menggantikan peran dana mandiri yang sebelumnya diperoleh dari kantin sekolah. Sebagai pewawancara, kami melihat bahwa diversifikasi sumber dana menjadi kebutuhan penting agar stabilitas keuangan sekolah dapat lebih terjaga.

Selain itu, dari hasil diskusi dan wawancara dengan pihak sekolah, kami mendapati bahwa mekanisme pengawasan anggaran dilakukan secara kolektif dan melibatkan banyak pihak seperti kepala sekolah, bendahara, KTU, wakil kepala sekolah, hingga komite. Hal ini memperkuat sistem kontrol internal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sekolah. Namun, menurut pengamatan kami, sistem pengawasan yang berlapis ini juga membuat proses persetujuan penggunaan dana terkadang membutuhkan waktu lebih panjang. Meskipun demikian, seluruh pihak sekolah berusaha mengikuti aturan serta mempertahankan ketertiban

administrasi dengan pemanfaatan ARKAS yang membantu memperjelas alur perencanaan dan pelaporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah berkomitmen menjaga integritas pengelolaan dana meskipun menghadapi berbagai keterbatasan teknis.

Dari keseluruhan temuan penelitian, kelompok kami menyimpulkan bahwa tantangan terbesar dalam manajemen keuangan di SMPN 1 Mataram adalah keterbatasan fleksibilitas anggaran, aturan BOS yang rigid, serta terbatasnya kemampuan sekolah untuk melakukan belanja modal atau menghadapi kebutuhan mendesak di luar rencana kerja. Meskipun demikian, sekolah tetap mampu menjalankan kegiatan operasional dengan baik melalui perencanaan yang matang dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menilai bahwa peningkatan kapasitas SDM keuangan, penguatan pendanaan mandiri, serta evaluasi rutin terhadap penggunaan ARKAS sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dengan upaya tersebut, sekolah akan lebih siap menghadapi dinamika kebutuhan pendidikan dan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada peserta didik secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2021). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). *Panduan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Versi 3.0: Panduan Penggunaan*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Lazwardi, D., Fahrudin, F., Saputra, H. H., & Mustari, M. (2024). Management of School Operational Assistance Funds at Assyafi'iyah NW Penangsak Praya Timur Elementary School. *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, 9(11), 175–182.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, L., & Suryani, D. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 6(2), 112–124.
- Sari, R. P., & Pratama, D. (2023). Implementasi ARKAS dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Nusantara*, 4(1), 45–57.
- Supriyadi. (2021). *Pengawasan Pendidikan dan Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taufik, M., & Rahmadani, N. (2024). Analisis Tantangan Pengelolaan Dana BOS di Era Digitalisasi Sekolah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Pendidikan*, 8(1), 66–78.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). (Pemutakhiran 2022). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yuliana, R., & Hakim, F. (2025). Efektivitas Sistem ARKAS dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Sekolah. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Administrasi*, 5(1), 1–12.